

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purnama Sari, mewawancarai 3 informan dengan mempertimbangkan dari segala aspek. Informan pertama bernama ibu sulis, memberikan pendapat bahwa pada saat pemakaian barang dagangnya untuk keperluan pribadi ibu sulis mencatat dan mengurangi stok barang yang ada tanpa menerima pembayaran. Informan kedua bernama ibu dea, memberikan pendapat bahwa Penggunaan barang pribadi selalu terjadi tanpa membayar; Informan ketiga bernama ibu vita memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan entitas akan tetapi Ibu Vita masih menghindari pencatatan dengan mengambil terlebih dahulu barang dagangan yang diperlukan secara pribadi sebelum stok barang masuk(Sari, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk memisahkan antara keuangan pribadi dan memisahkan keuangan bisnisnya. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan akan akuntansi menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi kegiatan usaha.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maciej Wozniak dan Joanna Duda Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara komponen produk domestik bruto (PDB) dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Polandia pada tahun 1996-2016. Data statistik yang menegaskan pentingnya perusahaan-perusahaan ini dalam pengembangan ekonomi, seperti indikator kewirausahaan, partisipasi UKM dalam total pekerjaan dan partisipasi UKM dalam menghasilkan nilai tambah(Wozniak Maciej & Duda Joanna, 2019).

Dari hasil penelitian yang ditinjau, dapat diperhatikan bahwa posisi Polandia terhadap latar belakang negara-negara UE lainnya dengan Dua dari tiga indikator yang dianalisis di bawah rata-rata UE yang kaitan dengan jumlah karyawan yang dipekerjakan di sektor UKM di atas rata-rata Uni Eropa adalah sangat penting serta berkontribusi pada penciptaan Produk Domestik Bruto, dan juga memainkan peran sosial utama karena mereka mengurangi pengangguran.

Sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh Yananto Mahadi Putrabertujuan untuk pemetaan UMKM yang telah membuat Laporan Keuangan sesuai dengan SAK EMKM dan pembuktian efektifitas SAK EMKM tersebut. Didalam penelitiannya melibatkan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas KUKM) Kota Tangerang Selatan tahun 2017 Dengan kriteria pemilih sampel penelitian sebanyak 911 sektor aneka usaha(Putra, 2018).

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa 74,6% pelaku ataupun pengelola UMKM belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang SAK EMKM .sehingga menginginkan adanya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai SAK EMKM tersebut; kedua Dari hasil pengamatan dan survei kepada pelaku UMKM, bahwa mayoritas (80,4%) UMKM di Kota Tangerang Selatan belum melakukan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangannya; ketiga adalah kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.

Dalam penelitan lain yang serupa oleh Ribka Agustine Singal dan Sherly Pinatik bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Standar Auntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada penyajian laba rugi dan laporan posisi keuangan pada PT. Karunia Multiguna Abadi. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dimana peneliti mengumpulkan, mengevaluasi serta membandingkan penyajian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan PT. Karunia Multiguna Abadi.

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang dibuat oleh PT.Karunia Multiguna Abadi pada bulan September tahun 2015 masih belum sesuai dengan kaidah Standar Auntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan masih ada pengklasifikasian pos akun yang belum disajikan, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan laporan keuangan (Agustine & Pinatik, 2015).

Dan didukung oleh Anantio, kualitas informasi akuntansi menjadi karakteristik khusus yang menjadi kekuatan pada UMKM, Tujuan penelitian ini mengisi celah yang diidentifikasi mengenai bukti langka tentang kualitas

pelaporan dan perbedaannya jenis perusahaan keluarga, khususnya perusahaan keluarga yang tidak terdaftar.

Hasil yang diperoleh dari 252 UMKM yang ada di Spanyol menunjukkan bahwa pengaruh keluarga mempengaruhi kualitas praktik pelaporan keuangan karena bisnis keluarga harus menyadari kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan mempromosikan keterlibatan keluarga dalam hal budaya dan pengalaman, sementara membatasi kekuasaan di dalam perusahaan serta menghindari efek negatif dari keputusan manipulasi akuntansi tentang harapan keluarga. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan keterlibatannya keluarga dalam hal budaya dan pengalaman serta membatasi kekuatan pada usahanya (Antonio, 2018).

Dalam penerapan akuntansi dan pemanfaatan akuntansi yang dilakukan oleh (Ediraras, 2010) bertujuan sebagai dasar pembuatan keputusan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Penelitian ini melakukan survei langsung kepada 110 pemilik usaha di Depok. Pada penelitian ini, informasi akuntansi diperoleh dari hasil akuntansi atau dari catatan utang piutang serta laporan penerimaan dan pengeluaran tiap bulannya.

Hasil dari penelitian ini terdapat sebanyak 94 responden atau sekitar 85.5% telah melakukan akuntansi, sedangkan sisanya sebanyak 16 responden atau sekitar 14.5% belum melakukan akuntansi. Untuk pembuatan dan pengarsipan catatan utang piutang telah dilakukan oleh 77 responden atau sekitar 70%, sedangkan 30% yaitu sebanyak 33 responden belum membuat dan mengarsip catatan utang piutang. Sementara itu, responden yang telah membuat dan mengarsip laporan penerimaan dan pengeluaran sebanyak 91 atau sekitar 82.7%.

Sedangkan dalam penggabungan usaha yang dilakukan oleh Raphael Kaplinsky dan Mike Morris bertujuan melihat dampak merger terhadap kinerja akuntansi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Yunani yang terlibat dalam merger. Sampel dari penelitian ada tiga puluh dua perusahaan terdaftar yang terserap di empat sektor (sektor primer, intensif teknologi) sektor industri, sektor komersial dan jasa, sektor konstruksi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan atau perburukan yang signifikan secara statistik untuk tidak satupun dari variabel yang diperiksa

pada periode pasca-merger untuk perusahaan yang bergabung di sektor primer, intensif teknologi, sektor industri, sektor komersial dan jasa, sektor konstruksi yang diperiksa (Kaplinsky & Morris, 2019).

Serta dalam menerapkan pencatatan dalam bentuk komputerisasi yang dilakukan oleh Bety Nur Achadiyah bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan software pada UMKM berdasarkan kebutuhan menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)*, jenis PAR ini baik peneliti maupun pelaku UMKM dianggap sebagai partisipan.

Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembuatan sistem otomatisasi akuntansi yang berbasis excel mempermudah pelaku UMKM baik dalam proses pengelolaan keuangan maupun proses pengambilan keputusannya. Pengambilan keputusan yang biasanya hanya dilakukan menurut perkiraan pemilik, saat ini dapat dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari program yang telah dibuat (Achadiyah, 2019).

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki definisi yang berbeda pada setiap literasi yang diatur dalam oleh instansi pemerintah dengan atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 2008 nomor 20 tentang usaha mikro kecil dan menengah, dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah karyawan bersih atau hasil tahunan penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008. Didalam pasal 6 dalam undang-undang ini memiliki kriteria yaitu :

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(sumber UU RI No.20 Tahun 2008)

2.2.2. Definisi Akuntansi

Dalam buku yang diterbitkan oleh Dwi harti pada tahun 2011, akuntansi adalah sistematika pencatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang

meliputi aset dengan sumber dananya. Aset diperoleh dari pemilik usaha yang disebut ekuitas, sedangkan aset yang diperoleh dari pihak lain disebut liabilitas.

Dari pengertian tersebut akuntansi dapat disimpulkan bahwa kegiatan akuntansi meliputi :

1. Pencatatan (*recording*) transaksi-transaksi keuangan. Pada tahap ini setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal
2. Pengelompokan (*classification*). Pada tahap ini menunjukkan aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokan menurut kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun aset (*assets*), akun liabilitas (*liabilities*), akun ekuitas (*equities*), akun pendapatan (*revenue*) dan akun beban (*expenses*).
3. Pengikhtisaran (*summarizing*). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja.
4. Pelaporan (*reporting*). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan disusun secara sistematis untuk dapat dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan secara lengkap (*full disclosure*). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi (*income statement*), laporan perubahan ekuitas (*equity statement*), laporan posisi keuangan (*balance sheets*), laporan arus kas (*cash flow statement*), dan catatan atas laporan keuangan.
5. Penafsiran (*analizing*). Tahap ini merupakan lanjutan dari proses akuntansi secara teknis, yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organisasi.

2.2.3. Penyusunan Laporan Keuangan

2.2.3.1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.2.3.2. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang Aset, Liabilitas, Ekuitas pemilik selama periode atau waktu tertentu. Laporan posisi keuangan dalam SAK EMKM dapat mencakup akun-akun berikut: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas.

2.2.3.3. Laporan Kinerja

Informasi kinerja keuangan atau laporan laba-rugi entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains) adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, dan keuntungan mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan.
- b. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal (misalnya beban pokok penjualan) dan kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal.

Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan aset dan liabilitas.

2.2.3.4. Persediaan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) mengatur persediaan melalui prinsip pengakuan, pengukuran dan penyajian persediaan. Persediaan sendiri dalam SAK EMKM ialah aset yang ditujukan untuk dijual dalam kegiatan usaha.

Pengakuan dan Pengukuran Persediaan

Persediaan diakui ketika diperoleh sebesar harga perolehannya. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh harga pembelian ditambah biaya konversi dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan. Demi mempermudah pengukuran dapat memilih teknik-teknik pengukuran persediaan seperti biaya standar, metode eceran atau metode laba kotor agar dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan.

Penyajian Persediaan

Persediaan disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan dan jika persediaan dijual maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban selama periode di mana pendapatan yang terkait diakui.

Sistem Pencatatan Persediaan

(Warren et al., 2015) Ada dua sistem pencatatan persediaan dalam akuntansi yaitu pencatatan persediaan dengan sistem perpetual dan pencatatan persediaan dengan sistem periodik. Sistem pencatatan perpetual ialah sistem dimana setiap persediaan barang dagang yang masuk dan keluar dicatat ke dalam pembukuan. Sedangkan sistem pencatatan periodik ialah sistem dimana setiap persediaan barang dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir periode untuk melakukan pembukuan. Masing masing dari sistem tersebut memiliki keunggulan, dengan sistem perpetual bisa mengetahui saldo persediaan kapan saja karena selalu di bukukan/dijurnal setiap adanya aktivitas keluar masuk. Sementara sistem periodik pencatatan hanya dilakukan saat pembelian, dan pencatatan harga pokok penjualan dilakukan saat akhir periode yang ditentukan misalnya bulanan sehingga lebih cepat dan ringkas dalam pembukuan.

Melaporkan Persediaan Dalam Laporan Keuangan

Biaya merupakan dasar utama penilaian persediaan barang dagang, akan tetapi dalam beberapa kasus persediaan di nilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya.

(Warren et al., 2015) ada dua macam kasus yang timbul saat :

1. Biaya penggantian barang dalam persediaan berada dibawah biaya yang dicatat.
2. Persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat atau terkena bencana alam.

Jika kondisi tidak memungkinkan dan penggunaan sistem pencatatan perpetual dan periodik pun tidak praktis, dalam hal ini biaya persediaan harus diperkirakan menggunakan salah satu dari 2 metode perhitungan biaya persediaan yaitu: metode laba kotor dan metode ritail.

2.2.3.5. Masalah Penilaian Persediaan

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah penilaian tambahan persediaan barang menggunakan Metode Laba Kotor (*Gross Profit Method*) yaitu sebuah perhitungan fisik persediaan barang dagang untuk memverifikasi keakuratan catatan persediaan secara perpetual meskipun kadang-kadang cara tersebut tidak praktis(Kieso, 2017). Dalam hal ini pelaku bisnis dapat menggunakan langkah-langkah pengganti untuk memperkirakan jumlah persediaan dengan metode pengganti untuk menentukan jumlah persediaan di akhir periode. Perhitungan metode laba kotor dalam sebagian besar situasi menggunakan persentase dalam menentukan keuntungan atas penjualan dengan cara mengestimasi persentase keuntungan dikali dengan total penjualan selama satu periode akuntansi.

2.2.3.6. Metode Laba Kotor Dalam Penyusunan Laporan Laba Rugi

(Warren,2015:367)Metode laba kotor ialah metode yang menggunakan estimasi laba kotor dalam periode tertentu untuk mengestimasi persediaan akhir barang dagang. Laba kotor biasanya diperkirakan dari tingkat aktual tahun sebelumnya, disesuaikan seluruh perubahan yang dibuat dalam biaya dan harga jual selama periode berjalan.

Metode Laba Kotor diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya (*at cost*).
2. Menghitung estimasi laba kotor dengan mengkalikan penjualan bersih dengan persentase laba kotor.
3. Menghitung estimasi harga pokok penjualan dengan mengurangi estimasi laba kotor dari penjualan bersih.
4. Menghitung estimasi biaya persediaan akhir dengan mengurangi estimasi harga pokok penjualan dari persediaan yang tersedia untuk dijual.

Ilustrasi dalam penggunaan metode laba koror sebesar 30% sebagai berikut:

Persediaan, 1 Januari	Rp.57.000.000,00
Pembelian bulan Januari(neto)	Rp.180.000.000,00
Barang tersedia untuk dijual	Rp.237.000.000,00
Penjualan untuk bulan Januari	Rp.250.000.000,00
Estimasi laba kotor 30%	Rp.75.000.000,00
Harga Pokok Penjualan	Rp.175.000.000,00

Sumber (Warren et al., 2015)

Metode Ritel

(Warren,2015:365)Metode retail adalah mengharuskannya biaya dan harga retail dipertahankan untuk persediaan siap dijual yang akan memperoleh rasio terhadap harga retail, rasio tersebut digunakan untuk mengubah persediaan akhir barang dagang dengan harga retail ke estimasi biaya persediaan akhir.

Metode Ritel diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya (*at cost*) dan pada harga ritel.
2. Menghitung rasio biaya terhadap harga ritel atas biaya yang tersedia untuk dijual.
3. Menghitung persediaan akhir pada harga ritel dengan mengurangi penjualan bersih dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga ritel.
4. Menghitung estimasi biaya persediaan akhir dengan mengalikan persediaan akhir pada harga ritel dengan rasio biaya terhadap harga ritel.

Ilustrasi dalam penggunaan metode laba koror sebesar 30% sebagai berikut:

	Biaya	Ritel
Persediaan, 1 Januari	Rp.19.400.000,00	Rp.36.000.000,00
Pembelian bulan Januari(neto)	Rp.42.600.000,00	Rp.64.000.000,00
Barang tersedia untuk dijual	Rp.62.000.000,00	Rp.100.000.000,00
Rasio biaya terhadap ritel = 62% $\frac{62.000.000}{100.000.000}$		
Penjualan untuk bulan Januari		Rp.70.000.000,00
Persediaan akhir pada harga ritel		Rp.30.000.000
Persediaan akhir pada biaya estimasi (62% x 30.000.000)		Rp.18.600.000

Sumber (Warren et al., 2015)

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



